

ABSTRAK

Perlindungan hak tersangka jadi sangat penting terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan telah diratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam KUHAP Penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya. Tugas Penyidik adalah melaksanakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada waktu seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka dia harus berhadapan dengan Penyidik yang tugasnya adalah mencari dan mengumpulkan barang bukti tentang tindak pidana yang terjadi.

Rumusan Masalah. Bagaimana pelaksanaan penetapan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana dalam perspektik perlindungan hak asasi manusia? Kendala-kendala apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam penetapan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut hukum acara pidana dalam perspektik perlindungan hak asasi manusia dan solusinya? penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis berarti bahwa dalam penelitian ini menekankan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku berdasarkan pada aspek peraturan-peraturan hukum positif. Sosiologis dalam penelitian ini menekankan pada gejala-gejala hukum yang timbul dimasyarakat berkaitan, dengan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mempergunakan data primer sebagai data utama. Jadi, pendekatan yuridis Sosiologis dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bahwa penetapan tersangka dalam proses penyelidikan dapat diakui keabsahannya sesuai dengan SOP, KUHAP mengenai pengertian proses penyelidikan serta penyidikan dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penetapan status tersangka, hak-hak tersangka dipenuhi. a. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. b. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara..Laporan Polisi Nomor: LP/B/93/I/2020/Jateng/Res PT, tanggal 30 Januari 2020, perkara tindak pidana Perbankan di Polres Pati Jawa Tengah adalah: a. Tersangka sering memberikan keterangan yang berbelit-belit didepan penyidik, dan sering menghilangkan barang bukti, hal ini akan membutuhkan waktu dalam mengungkap suatu tindak pidananya yang dilakukan. b. Pemanggilan para saksi korban dan saksi ahli yang sering kali tidak tepat waktu; c. Kurangnya dukungan anggaran untuk penanganan perkara pidana.

Kata Kunci : Penetapan tersangka, perkara pidana, perspektik perlindungan hak asasi manusia

ABSTRACT

The protection of the rights of suspects is very important in relation to the protection of human rights and has been ratified by the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning the Protection of Human Rights (HAM). In the Criminal Procedure Code investigators are given the authority to carry out forced measures in the form of arrest, detention, examination, confiscation and so on. The task of the investigator is to carry out investigations in a manner regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). When a person is declared a suspect, he must face an investigator whose job is to find and collect evidence about the criminal act that occurred.

Formulation of the problem. How is the implementation of the determination of the suspect in the process of investigating a criminal case according to the criminal procedure law in the perspective of protecting human rights? What are the obstacles faced by law enforcers in determining suspects in the process of investigating criminal cases according to the criminal procedure law in the perspective of protecting human rights and the solution? The research used a sociological juridical approach. Juridical means that in this study emphasizes the applicable legal principles based on the aspects of positive legal regulations. Sociology in this study emphasizes the symptoms of law that are not associated with society, with the implementation of a statutory regulation. Sociological juridical approach or empirical legal research is a legal research that uses primary data as the main data. So, the sociological juridical approach in this study means that in analyzing the problem it is done by combining legal materials which are secondary data with primary data obtained in the field.

Research and Discussion: That the legality of the determination of a suspect in the investigation process can be recognized in accordance with the SOP, KUHAP regarding the meaning of the investigation and investigation process and the National Police Regulation Number 12 of 2009 concerning Supervision and Control of Criminal Case Handling within the State Police of the Republic of Indonesia regarding the determination of suspect status, rights - suspect rights fulfilled. a. The investigator's status as a suspect can only be determined by a person after the results of the investigation carried out have obtained sufficient initial evidence, namely at least 2 (two) types of evidence. b. To determine whether to obtain sufficient preliminary evidence, namely at least 2 (two) types of evidence as referred to in paragraph (1) shall be determined through the title of the case. Police Report Number: LP / B / 93 / I / 2020 / Jateng / Res PT, dated January 30, 2020, the banking crime cases at the Pati Police, Central Java are: a. Suspects often give convoluted statements in front of investigators, and often lose evidence, this will take time to reveal a criminal act that was committed. b. The often not timely summons of victim witnesses and expert witnesses; c. Lack of budget support for handling criminal cases.

Keywords: *Determination of suspects, criminal cases, from the perspective of protecting human rights*